

**Rahmah Ningsih, S.H.I.,MA. Hk**



*Modul Pembelajaran-On line 9*

# **BELA NEGARA**

*E-Learning*

**UNIVERSITAS ESA UNGGUL  
TAHUN 2019**

# MODUL 9

## BELA NEGARA



**Kemampuan akhir yang diharapkan** adalah mahasiswa memahami pengetahuan tentang bela negara. Sehingga dapat diimplementasikan dalam bentuk sikap dan perilaku cinta tanah air serta bertekad melaksanakannya sepanjang hayat.

### PENGANTAR

Pada bagian ini, materi pokok bahasan adalah pengetahuan bela negara, meliputi lima indikator, yang secara konseptual meliputi :

1. Cinta tanah air
2. Rela berkorban
3. Sadar berbangsa dan bernegara
4. Meyakini Pancasila sebagai ideologi negara
5. Memiliki kemampuan awal bela negara

Masing-masing dapat dijelaskan secara sederhana tentang bentuk wujud yang harus dilakukan demi tercapainya tujuan tersebut.

#### 1. Rasa Cinta Tanah Air

Rasa cinta tanah air dapat diimplementasikan dalam wujud pikiran, sikap dan tindakan yang menghadirkan rasa memiliki (**sense of belonging**) terhadap bangsa dan negara Indonesia. Misalnya: dengan konsisten mempergunakan produk dalam negeri. Muncul ekspresi rasa kebanggaan kalau memakai hasil (**made in**) Indonesia. Dapat dicontohkan membeli sepatu, pakaian, peralatan rumah tangga, perabotan dan lainnya adalah produksi lokal, bukan produk impor dari negara lain. Dalam hal kuliner, akan ada rasa senang dengan mengkonsumsi makanan atau kuliner “ala Indonesia asli” yang bahan-bahannya bersumber dari dalam negeri. Dipandang perlu membudayakan makanan tradisional khas Indonesia yang kaya gizi, vitamin dan nutrisi seperti: singkong, tahu, tempe dan kuliner-kuliner yang khas daerah dari Sabang sampai Merauke, seperti Mie Aceh, Rendang Padang, Mpek-mpek Palembang, Soto Betawi, Gudeg Jogja, Rawon Jatim, Soto Makasar, dan lainnya. Kenapa harus membeli ayam di **Kentucky**? Kenapa harus membeli roti di **MacDonald**? Padahal i ayam goreng dan kuliner Indonesia asli tersedia sangat banyak dan bervariasi di bumi ibu pertiwi ini.

Dapat disimpulkan bahwa cinta tanah air merupakan kemampuan mengimplementasikan rasa memiliki, sayang dan memelihara tanah air

Indonesia sebagaimana seseorang mencintai Tuhan-Nya, diri sendiri, pacar, saudara dan atau benda-benda yang disayangi.



## 2. Rela Berkorban

Makna rela berkorban sering ditafsirkan secara sempit, yaitu hanya dilihat dari sudut pandang pengorbanan material. Padahal dalam hal menyangkut hak dan kewajiban bela negara, pengorbanan itu meliputi segala aspek yang sangat luas, tidak hanya perihal material semata melainkan juga menyangkut kontribusi pikiran, sikap dan tindakan yang di **design** untuk kepentingan bangsa dan negara. Ada ungkapan menarik yang patut direnungkan : "Jangan tanyakan apa yang telah negara berikan, tetapi tanyakan apa yang telah anda berikan pada negara". **Statement** ini menunjukkan betapa besarnya semangat nasionalis yang perlu ditanam dalam jiwa dan raga bangsa, sebagai penguatan bentuk pengorbanan terhadap negara.

**Pikiran**, diorientasikan bagaimana dapat memberikan ide-ide, gagasan-gagasan, dan pikiran-pikiran cerdas bagi pembangunan nasional dan kemajuan negara. **Sikap**, diaplikasikan dalam bentuk ada kepedulian terhadap kehidupan sosial, sikap tidak merongrong bangsa, sikap tanggap terhadap situasi dan kondisi tertentu yang dinamis, sikap membangun, sikap positif dan lain sebagainya. **Tindakan** didedikasikan semata-mata untuk kepentingan negara. Misalnya: membantu secara ekonomis kepada sesama dengan konsep infak dan sadakah, menunaikan kewajiban membayar pajak, retribusi legal, turut serta mencegah dan mengatasi terjadinya bencana alam, bencana sosial sampai pada perang melawan gempuran dunia maya maupun perang

bersenjata dengan negara lain bila negara Indonesia sudah diserang secara kasat mata. Namun, pada prinsipnya Indonesia cinta damai dan cinta kemerdekaan. Oleh sebab itu, segala bentuk perang dan penjajahan harus dihapuskan di muka bumi, karena bertentangan dengan UUDNRI Tahun 1945, Pancasila dan Agama.

Secara etimologi, rela berkorban terdiri dari dua suku kata. **Rela** artinya bersedia dengan senang hati dan tidak mengharapkan imbalan atas dasar kemauan sendiri. **Berkorban** artinya memberikan segala sesuatu yang dimiliki sekalipun menimbulkan penderitaan bagi dirinya. Jadi, rela berkorban adalah sikap atau perilaku yang dengan senang hati tanpa mengharapkan imbalan apapun atas dasar kemauan sendiri untuk memberikan segala sesuatu yang dimiliki. Rela berkorban untuk bangsa dan negara merupakan manifestasi dari pengertian tersebut di atas dengan objek sasaran bangsa dan negara Indonesia sebagai bentuk kesetiaan dan pengabdian pada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

The infographic features a blue header with the logo 'Esa Unggul' and the tagline 'Smart, Creative and Entrepreneurial'. The main title 'INDIKATOR BELA NEGARA' is in a blue oval. A red circle on the left contains the text 'Rela berkorban' with an arrow pointing to a red box. The red box contains the following text:

**Rela berkorban, hakikat :** kemampuan berpikir, bersikap dan berperilaku atau bertindak yang ikhlas dalam membela negara Indonesia, sebagaimana bila seseorang membela Tuhan-Nya, hartanya diri sendiri, "pacarnya", keluarga, saudara dan orang atau benda-benda miliknya dari segala ancaman membahayakan.

Misalkan

1. Mendahulukan kepentingan negara dari pada kepentingan golongan dan individu.
2. Ikhlas berjuang untuk negara (pahlawan)
3. Ikhlas berprestasi, bekerja profesional dan membangun negara
4. Gotong royong, membantu warga negara sesama manusia keluar dari kemiskinan dan kebodohan, dll

### 3. Sadar Berbangsa dan Bernegara

Kesadaran berbangsa dan bernegara diwujudkan dalam bentuk mentaati segala aturan negara, norma agama, sosial dan adat istiadat yang tidak bertentangan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Warga negara yang sadar bela negara adalah mereka yang memang benar-benar memiliki tingkat kesadaran untuk melaksanakan peraturan-peraturan dan norma-norma yang berlaku, sehingga produk

tindakan adalah berupa amanah, benar dan tidak melawan hukum serta tidak berkhianat pada negara. Misalnya: tertib berlalu lintas, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam kegiatan belajar, tidak melawan guru apalagi melaporkan guru kepada aparat polisi padahal guru berusaha menegakkan disiplin disekolah. Ikut aktif berorganisasi, bergotong royong dan saling menghargai mencirikan semangat kebersamaan dalam lingkup perbedaan. Berbeda tidak berarti bermusuhan, tetapi tetap dalam koridor Bhinneka Tunggal Ika.

The infographic features a blue header with the text 'Esa Unggul Smart, Creative and Entrepreneurial'. Below this, a blue oval contains the title 'INDIKATOR BELA NEGARA'. To the left, a black circle with a white arrow points to a black box containing the following text:

**Sadar berbangsa dan bernegara**

**Sadar berbangsa dan bernegara, hakikat :** kemampuan berpikir, bersikap dan bertindak mentaati segala peraturan, norma-norma, nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Misalkan

1. Mentaati tertib lalu lintas, disiplin dan profesional dalam bejerja, saling menghargai antar sesama, mampu berbaaur dalam perbedaan (pandangan, etnis dan perilaku sosial budaya).
2. Menunaikan semua kewajiban kepada negara
3. Melaksanakan amanah Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa dan UUD NRI 1945, dll

#### 4. Meyakini Pancasila sebagai Ideologi Bangsa

Nilai-nilai Pancasila digali dan berasal dari akar budaya asli bangsa. Artinya Pancasila sangat cocok dipergunakan sebagai pedoman (**guiding principle**) dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila mengakui keberagaman agama, keanekaragaman asal suku bangsa, perbedaan adat istiadat, keberadaan tradisi lokal, budaya setempat dan lainnya yang terintegrasi dalam satu wadah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila menentang adanya paham liberalisme yang mengutamakan kebebasan individu, menentang paham komunisme-sosialisme yang jelas-jelas tidak ber-ketuhanan, menentang radikalisme yang penuh kekerasan, menentang terorisme yang mengancam keamanan dan ketenteraman bangsa, dan menentang isme-isme atau paham-paham lain yang tidak bermoral dan tidak dapat mempersatukan keutuhan (integrasi) bangsa dan negara Indonesia. Pancasila sangat cocok dengan kondisi pluralis bangsa Indonesia,



sehingga dalam kondisi dinamis seperti apapun bila menggunakan paham Pancasila, tetap akan memperkokoh persatuan, kesatuan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara (**survival**).



## 5. Memiliki Kemampuan Awal Bela Negara

Kemampuan awal bela negara merupakan sesuatu kompetensi atau kemampuan yang mencakup pengetahuan (**knowlegde**), sikap (**atitude**) dan keterampilan (**skill**) tentang bela negara. **Pengetahuan** meliputi berbagai konsepsi bela negara tentang hasil pembelajaran dari penginderaan seseorang, bahwa pengetahuan (tahu) didapat secara langsung dari kerja aktif indra manusia. Contoh: pelajar, siswa, mahasiswa sudah berkontribusi bela negara bila berprestasi dalam belajar, berolahraga menjadi juara dunia sehingga mengharumkan nama bangsa. Pemuda dengan bekal pengetahuannya mampu bekerja secara profesional bahkan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi warga negara yang membutuhkan. Masyarakat memahami akan lambang-lambang negara, sehingga tidak terjadi penghinaan terhadap lambang negara Burung Garuda, misalnya. Semua warga negara mengetahui sejarah perjuangan bangsa yang benar dan menjadi kompetensi dasar atau kemampuan awal dalam menunaikan hak dan kewajiban bela negara. **Sikap** mencakup sikap kritis-konstruktif, artinya mampu menunjukkan adanya keberanian dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bangsa dan negara. Misalnya: sikap mengkritisi kebijakan nasional yang kurang tepat, tetapi harus diberikan konsep solusi yang

benar dan tidak memaksakan kehendak dalam bentuk sumbang saran harus dilaksanakan. Sikap visioner terhadap usaha-usaha peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, pelaksanaan keadilan, pemerataan pembangunan, keamanan dan lain sebagainya yang memberikan kontribusi positif terhadap NKRI.



**Keterampilan** atau kemampuan melakukan sesuatu perbuatan yang ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Kemampuan ekonomis yang dapat mensejahterakan masyarakat dan mengedepankan tindakan yang nasionalis. Misalnya: keterampilan mencegah, mengantisipasi atau menolak pengaruh-pengaruh negatif yang berasal dari dalam maupun luar. Seperti penolakan pornografi-pornoaksi, penjualan manusia (**trafficking**), pencegahan dan pemberantasan atau penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (bisnis narkoba, penyelundupan narkoba, *narkoterorizm*), pencegahan dan pemberantasan korupsi, tidak menggunakan media sosial untuk menghasut, memfitnah, memprovokasi, dan lain sebagainya merupakan kemampuan awal bela negara dalam bentuk non fisik. Akan lebih bagus bila dilengkapi dengan kemampuan berupa rakyat terlatih (*ratih*) bela negara, seperti yang telah dan sedang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan program Pendidikan dan Pelatihan Kader Bela Negara yang berlangsung sejak tahun 2015.

Dengan memahami konsepsi bela negara terutama sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

tahun 1945, dan Peraturan-Peraturan Pemerintah lainnya, diharapkan setiap warga negara akan menjadi cerdas bela negara. Sehingga hipotesis yang diungkapkan pada judul di atas “Cerdas Bela Negara, akan menjadi Setia dan Patuh kepada Negara” benar-benar terwujud dan menjadi kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk lebih meningkatkan semangat nasionalisme bela negara, perlu menjadi perenungan apa yang diungkapkan oleh Ryamizard Ryacudu, Menteri Pertahanan Republik Indonesia pada tahun 2015. Beliau menyampaikan dalam acara pembukan pendidikan dan pelatihan kader bela negara bahwa tidak ada batasan umur dan profesi warga dalam Bela Negara, mulai dari tukang ojek hingga rektor sekalipun wajib ikut serta dalam Bela Negara. Bela Negara bukan wajib militer tetapi hak dan kewajiban masyarakat pada negara, kalau tidak suka Bela Negara, tidak cinta tanah air, “**angkat kaki saja**” dari Indonesia.

### **Landasan Pelaksanaan Bela Negara**

1. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27 ayat (3) menekankan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya **bela negara**. Pasal 30 ayat (1) dan (2) berbunyi: tiap warga negara berhak dan wajib dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian sebagai komponen utama serta didukung seluruh rakyat.
2. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 6B menegaskan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya **pembelaan negara** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. UU NO. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. Pasal 9 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya **bela negara** yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Ayat (2): Keikutsertaan warga negara dalam upaya **bela negara** dimaksud ayat (1) diselenggarakan melalui Pendidikan Kewarganegaraan, Latihan Dasar Kemiliteran, Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela dan wajib, Pengabdian sesuai profesi.
4. Tap MPR No. VI Tahun 1973 Tentang Konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional.



Esas Unggul Smart, Creative and Entrepreneurial

**Bela Negara, hakikat : kecintaan, kesetiaan dan kerelaan berkorban warga negara kepada negara (fisik dan non fisik)**

**Indikator Bela Negara.**

- 1.Cinta tanah air
- 2.Rela berkorban
- 3.Sadar kebangsaan dan bernegara
- 4.Yakin Pancasila ideologi negara
- 5.Memiliki kemampuan bela negara

PASAL 27 AYAT 3 UUD NRI 1945 SETIAP WARGA NEGARA BERHAK DAN WAJIB IKUT SERTA DALAM UPAYA PEMBELAAN NEGARA

## A. Historis, Sosiologis dan Politis

### Historis

Pengkajian ketahanan nasional secara empiris dan sistematis memenuhi kaidah ilmu pengetahuan bermula dari:

#### 1. Awal tahun 1960-an

Pertama-tama dilakukan pengkajian oleh SEKOAD dulu namanya SSKD. Tujuan utamanya adalah menangkal pengaruh laten komunisme Uni Sovyet dan Cina. Pada waktu itu, pengaruh kemunisme di Asia, khususnya di wilayah Indo China terjadi sangat pesat. Pengaruh yang luar biasa ini telah menjadikan beberapa negara Indo China jadi menganut ideologi komunis, antara lain Laos, Vietnam, dan Kamboja. Pengaruhnya berkembang menjalar hingga ke Malaysia, Thailand, Filipina dan Singapore, termasuk di negara Indonesia. Meskipun pengaruh komunisme dapat diatasi, namun gerakan komunisme di Indonesia sudah berjangkit sejak tahun 1948 dan melakukan aksi pemberontakan biadab pada tanggal 30 September 1965. Demikian pula di negara Malaysia, Thailand, Filipina dan Singapur, paham komunisme berhasil ditumpas sehingga negara-negara tersebut tidak menjadi negara komunis.

Dari kajian historis bangsa Indonesia berhasil menangkal ancaman komunisme. Hal ini tidak terlepas dari kemampuan bangsa Indonesia dalam mempertahankan ideologi Pancasila sebagai ideologi negara. Belajar dari pengalaman itu, pihak TNI telah melakukan pengkajian sehingga makin mendapatkan inspirasi bahwa sangat diperlukan ketahanan nasional, khususnya di bidang ideologi. Tujuannya agar ideologi Pancasila tidak diganti dengan ideologi lain yang bertentangan dengan falsafah dan dasar negara Indonesia.

## **2. Pada Tahun 1968**

Pada tahun 1968 mulai ditemukan tata kehidupan nasional yang utuh, menyangkut Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial budaya dan Pertahanan kemananan yang lazim disingkat dengan IPOLEKSOSBUDMIL. Pengembangan pemikiran tentang ketahanan nasional makin menguat, manakalah peristiwa G30S/PKI dapat ditangkal dan digagalkan oleh Tentara, yang secara nyata-nyata PKI berkeinginan mengambillalih pemerintahan Indonesia yang sah dan menjadikan komunisme sebagai ideologi bangsa dan negara.

Pengkajian dan pembelajaran tentang keberhasilan TNI menangkal dan menggagalkan komunisme di Indonesia, menuntun ke arah adanya konsepsi ketahanan nasional. Maka pada tahun 1969 lahir istilah ketahanan nasional yang intinya bahwa bangsa dan negara Indonesia memiliki kemampuan, keuletan dan daya tahan untuk menghadapi segala ancaman yang dapat membahayakan identitas, integritas bangsa dan negara Indonesia. Di tahun 1972 spektrum ketahanan nasional diperluas menjadi kemampuan, keuletan dan daya tahan dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri yang langsung dan/atau tidak langsung membahayakan identitas, integritas bangsa dan negara Indonesia.

## **3. Pada Tahun 1973**

Dari hasil pengkajian yang menelan waktu lebih kurang 10 tahun, maka pada tahun 1973 secara resmi konsep ketahanan nasional masuk ke dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Kemudian diperkuat dengan ditetapkannya dalam Tap MPR RI No. IV/Tahun/ 1978. Berdasarkan perkembangan hasil pengkajian, maka didapati 3 (tiga) perkembangan konsepsi ketahanan nasional (Ristek-Dikti. 2016), sebagai berikut:

Konsepsi ketahanan nasional pada awal tahun 1960-an sampai tahun 1968 ada pada keuletan dan daya tahan bangsa. Keuletan mencerminkan adanya upaya yang dilakukan terus-menerus dan tidak kenal menyerah. Sedangkan daya tahan bangsa merupakan kelanjutan dan penegakan dari sifat keuletan yang membuktikan adanya daya tahan bangsa yang dapat menangkal adanya berbagai ancaman. Konsepsi ketahanan nasional yang muncul pada tahun 1969 disokong dengan ketangguhan dan kemampuan. Sedangkan pada tahun 1972 konsepsi ketahanan nasional semakin diperluas dengan kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi ketangguhan, keuletan dan daya tahan bangsa dalam mengatasi dan menangkal segala bentuk ATHG : ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM).

## Historis, Sosiologis dan Politis KETAHANAN NASIONAL

### HISTORIS, pengkajian Tanas bermula

1. Awal tahun 1960-an di kaji di SEKOAD, tujuan menangkal pengaruh komunisme Uni Soviet dan Cina. Gerakan Komunis berhasil melakukan pemberontakan 30 September 1965
2. Tahun 1968 ditemukan tata kehidupan nasional menyangkut IPOLEKSOSBUDMIL. Tahun 1969 lahir istilah ketahanan nasional yang intinya keuletan dan daya tahan bangsa untuk menghadapi segala ancaman. Tahun 1972 spektrumnya di perluas ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG)
3. Tahun 1973 secara resmi konsep ketahanan nasional masuk kedalam GBHN, kemudian ditetapkan dalam Tap MPR RI No. IV/Tahun/ 1978. Sekarang ada laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional di Lemhanas.

### Sosiologis

Sebagaimana konsepsinya bahwa ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis, maka perjalanan dan implementasinya juga mengalami pasang surut sesuai dengan tingkat ketangguhan bangsa pada saat kondisi ipoleksosbunhankam itu terjadi. Ketahanan nasional sejak masa orde baru sampai menjelang reformasi dapat dikatakan mengalami masa kejayaan, tangguh dan kuat. Fakta menunjukkan bahwa pada masa itu, keberadaan kehidupan berbangsa, bernegara menjadi sangat stabil dan makmur. Kebijakan nasional dengan Trilogi Pembangunan : (1) stabilitas nasional yang dinamis, (2) pertumbuhan ekonomi yang tinggi (3) pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya benar-benar menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang kuat, makmur dan sejahtera. Bahkan dijuluki sebagai "Macan Asia". Artinya negara Indonesia dipandang sebagai negara yang kuat dan **survival** oleh negara-negara lain.

Setelah reformasi sesuai hasil kajian Lemhanas (2012), ditemukan bahwa tingkat ketahanan nasional mengalami penurunan, kerapuhan atau tidak tangguh lagi. Pengukuran tingkat ketahanan nasional dilakukan terhadap 33 provinsi Indonesia dengan menganalisa 8 gatra terhadap 847 indikator. Hasil pengkajian bersifat kuantitatif, sehingga masih perlu diurai faktor-faktor penyebabnya. Apakah karena kultur atau struktur yang salah, lembaganya yang salah atau prosesnya yang keliru. Kedelapan gatra yang menjadi ukuran ketahanan nasional mengalami penurunan. Oleh sebab itu ada solusi dalam mengatasi agar tingkat ketahanan nasional Indonesia dapat menjadi tangguh kembali dan menjadi barometer dalam menangkal

segala bentuk ATHG yang membahayakan bangsa dan negara Indonesia dalam mencapai tujuan nasional.

Dewasa ini sedang mencari formulasi untuk solusi yang efektif dan efisien dalam memantapkan implementasi ketahanan nasional, sehingga bangsa dan negara Indonesia menjadi tangguh dalam membangun bangsa dan sekaligus dapat menangkal segala bentuk ATHG yang dapat membahayakan bangsa dan negara Indonesia dalam mencapai tujuan nasional. Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) adalah lembaga yang menangani pengkajian ketahanan nasional dapat memberikan solusi dan formulasi dalam memantapkan dan menguatkan implementasi ketahanan nasional yang tangguh, bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.



### Politis

Bahwa konsepsi ketahanan nasional Indonesia sebagai doktrin, kondisi dan strategi dalam menangkal ATHG yang membahayakan kelangsungan nasional Indonesia. Sebagai doktrin sudah sepatutnya bangsa Indonesia memahami bahwa astagatra (8 gatra) dalam ketahanan nasional, merupakan suatu pengetahuan yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami sisi setiap gatra maka akan muncul kesadaran untuk secara terus menerus mencintai tanah air dan bela negara. Sebagai kondisi ketahanan nasional Indonesia tidak bisa lepas dari situasi dan kondisi politik di tanah air ketika suhu politik mengalami peningkatan, maka ketahanan nasional seharusnya menjadi kontrol bagi bangsa dalam mengambil kebijakan. Jangan sampai

membuat negara menjadi konflik apalagi terbelah (disintegrasi). Oleh sebab itu secara politik, ketahanan nasional sangat perlu mendapatkan dukungan dan penguatan agar tingkat ketahanan nasional dalam astagatra menjadi kuat dan tangguh. Sehingga ketahanan nasional menjadi strategi dalam pencapaian pembangunan nasional yang berkesinambungan dan berkelanjutan dengan hasil-hasil yang dapat dinikmati oleh bangsa Indonesia secara adil dan makmur.



Metode astagatra (gabungan pancagatra dan trigtra) dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkelanjutan, sebagaimana yang diutarakan di atas menjadi penting untuk diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan tingkat ketahanan yang tangguh, yang dimulai dari diri sendiri, keluarga, wilayah, regional dan nasional, maka kerapuhan tingkat ketahanan nasional dapat diatasi. Dengan demikian maka pelaksanaan bela negara dengan ketahanan nasional sebagai suatu metode akan dapat terlaksana, baik secara fisik maupun non fisik sebagai perwujudan dari hak dan kewajiban setiap warga negara dalam membela negara.

Menurut Kemristek Dikti (2016) unsur-unsur ketahanan nasional model Indonesia terdiri atas delapan unsur yang dinamakan Asta Gatra (delapan gatra), yang terdiri dari Tri Gatra (tiga gatra) alamiah dan Panca Gatra (lima gatra) sosial. Unsur atau gatra dalam ketahanan nasional Indonesia tersebut, sebagai berikut; Tiga aspek kehidupan alamiah (tri gatra) yaitu:



- 1) Gatra letak dan kedudukan geografi
- 2) Gatra keadaan dan kekayaan alam
- 3) Gatra keadaan dan kemampuan penduduk

Limna aspek kehidupan sosial (panca gatra) yaitu:

- 1) Gatra ideologi
- 2) Gatra politik
- 3) Gatra ekonomi
- 4) Gatra sosial budaya (sosbud)
- 5) Gatra pertahanan dan keamanan (hankam)

Model Asta Gatra merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya. Model ini merupakan hasil pengkajian Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). Adapun penjelasan dari masing-masing gatra tersebut adalah sebagai berikut: *Gatra letak geografi* atau wilayah menentukan kekuatan nasional negara. Hal yang terkait dengan wilayah negara meliputi; Bentuk wilayah negara dapat berupa negara pantai, negara kepulauan atau negara continental

- 1) Luas wilayah negara; ada negara dengan wilayah yang luas dan negara dengan wilayah yang sempit (kecil).
- 2) Posisi geografis, astronomis, dan geologis negara.
- 3) Daya dukung wilayah negara; ada wilayah yang *habitable* dan ada wilayah yang *unhabitable*

Dalam kaitannya dengan wilayah negara, pada masa sekarang ini perlu dipertimbangkan adanya kemajuan teknologi, kemajuan informasi dan komunikasi. Suatu wilayah yang pada awalnya sama sekali tidak mendukung kekuatan nasional karena penggunaan teknologi, wilayah itu kemudian bisa menjadi unsur kekuatan nasional negara. Sumber kekayaan alam dalam suatu wilayah baik kualitas maupun kuantitasnya sangat diperlukan bagi kehidupan nasional. Oleh karena itu, keberadaannya perlu dijaga dan dilestarikan. Kedaulatan wilayah nasional, merupakan sarana bagi tersedianya sumber kekayaan alam dan menjadi modal dasar pembangunan. Pengelolaan dan pengembangan sumber kekayaan alam merupakan salah satu indikator ketahanan nasional. Hal-hal yang berkaitan dengan unsur sumber daya alam sebagai elemen ketahanan nasional, meliputi:

- 1) Potensi sumber daya alam wilayah yang bersangkutan; mencakup sumber daya alam hewani, nabati, dan tambang
- 2) Kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam
- 3) Pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan lingkungan hidup
- 4) Kontrol atau kendali atas sumber daya alam

*Gatra penduduk* sangat besar pengaruhnya terhadap upaya membina dan mengembangkan ketahanan nasional. Gatra penduduk ini meliputi jumlah (kuantitas), komposisi, persebaran, dan kualitasnya. Penduduk yang produktif, atau yang sering disebut sebagai sumber daya manusia yang berkualitas, mempunyai korelasi positif dalam pemanfaatan sumber daya alam serta menjaga kelestarian lingkungan hidup (geografi), baik fisik maupun sosial.

*Gatra ideologi* menunjuk pada perangkat nilai-nilai bersama yang diyakini baik untuk mempersatukan bangsa. Bangsa Indonesia yang bersatu sangat penting untuk mendukung kelangsungan hidupnya. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman yang tinggi. Keadaan ini mempunyai dua peluang, yakni berpotensi perpecahan, dan yang kedua berpotensi sebagai kekayaan bangsa, menumbuhkan rasa kebanggaan, dan bersatu. Unsur ideologi diperlukan untuk mempersatukan bangsa yang beragam ini. Bagi bangsa Indonesia, nilai bersama ini tercermin dalam Pancasila.

*Gatra politik* berkaitan dengan kemampuan mengelola nilai dan sumber daya bersama agar tidak menimbulkan perpecahan tetap stabil dan konstruktif untuk pembangunan. Politik yang stabil akan memberikan rasa aman serta memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional. Pada gilirannya keadaan itu akan memantapkan ketahanan nasional suatu bangsa. Gatra politik ini nantinya diwujudkan dalam sistem politik yang diatur menurut konstitusi negara dan dipatuhi oleh segenap elemen bangsa.

*Gatra ekonomi.* Ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan terlebih di era global sekarang ini. Bidang ekonomi berperan langsung dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara. Kemajuan pesat di bidang ekonomi tentu saja menjadikan negara yang bersangkutan tumbuh sebagai kekuatan dunia. Contoh Jepang dan Cina. Setiap negara memiliki system ekonomi tersendiri dalam rangka mendukung kekuatan ekonomi bangsanya. Ekonomi yang kuat tentu saja dapat meningkatkan ketahanan ekonomi negara yang bersangkutan.

*Gatra sosial budaya.* Dalam aspek sosial budaya, nilai-nilai sosial budaya, hanya dapat berkembang di dalam situasi aman dan damai. Tingginya nilai sosial budaya biasanya mencerminkan tingkat kesejahteraan bangsa baik fisik maupun jiwanya. Sebaliknya keadaan sosial yang timpang dengan segala kontradiksi di dalamnya, memudahkan timbulnya ketegangan sosial. Kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia disokong dengan baik oleh seloka Bhinneka Tunggal Ika. Selama seloka ini dijunjung tinggi maka ketahanan sosial budaya masyarakat relatif terjaga.

*Gatra pertahanan keamanan Negara.* Unsur pertahanan keamanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara. Negara dapat melibatkan rakyatnya dalam upaya pertahanan negara sebagai bentuk dari hak dan kewajiban warga negara dalam membela negara. Bangsa Indonesia dewasa ini menetapkan politik pertahanan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pertahanan negara Indonesia bersifat semesta dengan menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama pertahanan didukung komponen cadangan dan komponen pendukung, terutama dalam hal menghadapi bentuk ancaman militer. Sedangkan dalam menghadapi ancaman nonmiliter, sistem pertahanan menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

## Daftar Pustaka

- Arwuyah, Yahya dan Runik Machproh. 2014. *Civic Education di Perguruan Tinggi di Indonesia*. Bandung : Alfabeta.
- Juliari, Budi. 2014. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta : Rajawali pers.
- Kaelan dan Achmad Zubaidi. 2013. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta : Paradigma.
- Kemristek-Dikti. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta : Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- Nugroho, Arisetyato. dkk. 2015. *Etika Berwarganegara Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Ridhuan, Syamsu., dan Wahid, Aliaras. 2019. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Jakarta : University Press Universitas Esa Unggul
- Ubaedilla, A., dan Abdul Rozak. 2013. *Pendidikan Kewarganegaraan, Civic Education*. Jakarta : ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Prenada Media Grup.

